

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Potensi ini tidak hanya berasal dari dominasi demografis umat Islam, tetapi juga didukung oleh prospek ekonomi syariah yang terus berkembang dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan, khususnya perbankan, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional menjadi salah satu elemen strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.¹

Fungsi utama bank adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit), sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem keuangan.² Dalam perkembangannya, perbankan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan negara. Saat ini, sistem perbankan tidak hanya didominasi oleh bank konvensional, tetapi juga mencakup perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran kedua

¹ Purnama Dewi Buchari, dkk, "Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score, Springate Dan Zmijewski (Studi Kasus Pada Bank Silicon Valley Yang Mengalami Kebangkrutan)", Jurnal EMBA, Vol. 11, No. 3, (2023), h. 114

² Haryo Firas Tunas Kuncoro. dkk, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia", Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, Vol. 6, No. 1, (2020), h. 88

sistem ini menunjukkan bahwa perbankan terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem perbankan syariah di Indonesia terdiri atas dua jenis lembaga utama, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴ Keduanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan pada keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberkahan. BUS melayani kebutuhan transaksi keuangan dalam skala besar dan luas, sementara BPRS lebih berfokus pada pelayanan masyarakat di tingkat lokal, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

Keberadaan kedua lembaga ini memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga perbankan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia melengkapi daftar institusi perbankan syariah, di mana BPRS dalam sistem perbankan Indonesia berperan sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi pembiayaan tanpa melibatkan bunga

³ Muhammad Zulkarnain. dkk, "Analisis Financial Distress Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 6, No. 2, (2022), h. 109-110

⁴ Cham dan Purnama. dkk, "Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia", *Manajemen : Jurnal Ekonomi USI*, Vol. 6, No. 2, (2024), h. 308

⁵ Himawan Pradipta, "Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, (2021), h. 78

atau riba, sesuai dengan prinsip syariah.⁶ Berikut adalah perkembangan nasional jumlah BPR dan BPRS tahun 2019 -2024:

Tabel 1.1

Perkembangan Nasional Jumlah BPR dan BPRS Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jenis Bank		Total
	BPR	BPRS	
2019	1.545	164	1.709
2020	1.506	163	1.669
2021	1.468	164	1.632
2022	1.441	167	1.608
2023	1.402	173	1.575
2024	1.367	174	1.541

Sumber : <https://ibpr-s.ojk.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah BPR Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada periode 2019–2024 menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan sebelumnya, dengan kecenderungan jumlah lembaga yang terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah BPR tercatat sebanyak 1.545 unit, kemudian menurun menjadi 1.506 pada tahun 2020. Penurunan ini berlanjut hingga menjadi 1.468 pada tahun 2021, 1.441 pada tahun 2022, 1.402 pada tahun 2023, dan menyentuh angka 1.367 pada tahun 2024.⁷

⁶ Abdul Aziiz Ahmad Fauzi. dkk, “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 04, No. 01, (2024), h. 35

⁷ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/StatistikPerbankan-Syariah---Desember-2024.aspx>

Penurunan jumlah ini bukan disebabkan oleh melemahnya sektor perbankan, melainkan merupakan bagian dari kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong konsolidasi industri BPR melalui mekanisme merger dan akuisisi. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing lembaga keuangan mikro di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Sementara itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, bahkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah BPRS tercatat sebanyak 164 unit, kemudian sedikit menurun menjadi 163 pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 164 pada tahun 2021 dan terus mengalami pertumbuhan bertahap, yakni menjadi 167 pada tahun 2022, 173 pada tahun 2023, hingga mencapai 174 pada tahun 2024.⁸ Tren peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan minat terhadap perbankan syariah di Indonesia, baik dari sisi pelaku usaha yang melihat peluang dalam industri keuangan syariah, maupun dari masyarakat yang semakin tertarik menggunakan layanan perbankan berbasis prinsip-prinsip Islam.

Berikut data BPR dan BPRS yang mengalami kebangkrutan dari tahun 2019 – April 2025 :

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/StatistikPerbankan-Syariah---Desember-2024.aspx>

Tabel 1.2
BPR dan BPRS yang mengalami kebangkrutan Tahun 2019 April 2025

Tahun	Jenis Bank	
	BPR	BPRS
2019	1. PT. BPR Jabal Tsur 2. PT BPR Pancadana 3. PT BPR Legian 4. PT BPR Efita Dana Sejahtera 5. PT. BPR Calliste Bestari 6. PT. BPR Fajar Artha Makmur	1. PT BPRS Safir Bengkulu 2. PT BPRS Muamalat Yotefa 3. PT BPRS Hareukat
2020	1. PT. BPR Tebas Loka rizki 2. PT. BPR Sekar 3. PT. BPR Lugano 4. PT. BPR Brata Nusantara 5. PT. BPR Artaprima Danajasa 6. PT. BPR Stigma Andalas 7. PT. BPR Nurul Barokah	1. PT BPRS Gotong Royong
2021	1. PT. BPR Sewu Bali 2. PT. BPR LPN Tapan 3. PT. BPR Bina Barumun 4. PT. BPR Sumber Usahawan Bersama 5. PT. BPR Utomo Widodo	1. PT BPRS Asri Madani Nusantara
2022	1. PT. BPR Pasar Umum	
2023	1. PT. BPR Bagong Inti Marga 2. PT. BPR Karya Remaja Indramayu 3. PT. BPR Indotama UKM Sulawesi 4. PT. BPR Persada Guna	
2024	1. PT. BPR wijayakusuma 2. PT. BPR Usaha Madani Karya Mulia 3. PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo 4. PT BPR Purworejo 5. PT. BPR EDC Cash 6. PT. BPR Aceh Utara	1. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) 2. PT BPRS Saka Dana Mulia 3. PT BPRS Kota Juang (Perseroda)

Tahun	Jenis Bank	
	BPR	BPRS
	7. PT. BPR Sembilan Mutiara 8. PT. BPR Bali Artha Anugrah 9. PT. BPR Dananta 10. PT. BPR Bank Jepara Artha 11. PT. BPR Lubuk Raya Mandiri 12. PT. BPR Sumber Artha Waru Agung 13. PT. BPR Nature Primadana Capital 14. PT. BPR Duta Niaga 15. PT. BPR Pakan Rabaa Solok Selatan 16. PT. BPR Kencana 17. PT. BPR Arfak Indonesia	
April 2025		1. PT. BPRS Gebu Prima

Sumber : Data diolah dari LPS

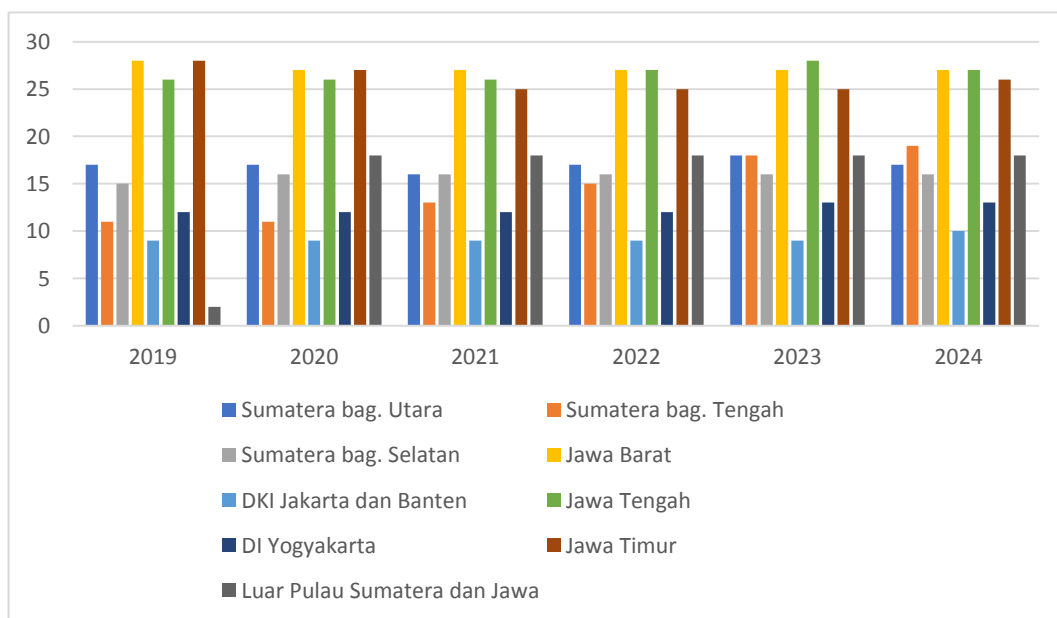
Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kebangkrutan tidak hanya dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetapi juga berpotensi terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2019 tercatat 6 BPR dan 3 BPRS ditutup. Jumlah ini berlanjut dengan penutupan 7 BPR dan 1 BPRS pada tahun 2020, 5 BPR dan 1 BPRS pada tahun 2021, serta 1 BPR pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat 4 BPR yang ditutup, sementara pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan penutupan 17 BPR dan 3 BPRS. Terbaru, pada 17 April 2025, satu BPRS kembali ditutup, yaitu BPRS Gebu Prima, yang tidak mampu memenuhi ketentuan tingkat permodalan dan kesehatan lembaga sebagaimana diatur oleh otoritas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada BPRS yang beroperasi di wilayah

Indonesia di luar Pulau Sumatera dan Jawa, guna melihat lebih jauh potensi risiko kebangkrutan pada lembaga keuangan syariah di kawasan tersebut.

Meskipun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki potensi besar dalam mendukung sistem keuangan syariah di Indonesia, kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam kondisi tertentu, BPRS dapat menghadapi kesulitan keuangan, terutama jika tidak dikelola secara efektif dan profesional. Masalah keuangan yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi krisis yang lebih serius, bahkan berujung pada kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kondisi kegagalan keuangan yang ditandai oleh ketidakmampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban keuangannya saat jatuh tempo. Dalam konteks ini, krisis likuiditas sering kali menjadi gejala awal sebelum terjadinya kebangkrutan. Situasi semacam ini tidak hanya berpotensi dialami oleh BPRS, tetapi juga oleh lembaga keuangan lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berikut diagram tentang Jumlah BPRS di Indonesia Tahun 2019-2024:

Diagram 1.1

Jumlah BPRS di Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019-2024.⁹

Diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di wilayah Indonesia luar Pulau Sumatera dan Jawa tetap stabil sebanyak 18 unit selama periode 2019 hingga 2024. Stabilitas ini mencerminkan keberlangsungan operasional BPRS, namun juga dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam perluasan jaringan di wilayah tersebut. Jumlah BPRS di Indonesia bagian luar Pulau Sumatera dan Jawa tetap stabil selama periode 2019–2024, yaitu sebanyak 18 BPRS. Tidak adanya perubahan signifikan menunjukkan minimnya pertumbuhan BPRS di wilayah tersebut. Untuk mencegah potensi kesulitan keuangan, diperlukan sistem peringatan dini melalui analisis kebangkrutan.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2019-2024). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

Penelitian ini fokus pada BPRS luar pulau Sumatera dan Jawa dikarenakan disparitas geografis, inklusi keuangan, dan tantangan unik operasional di daerah tersebut, seperti penyebaran yang tidak merata karena mayoritas BPRS di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. BPRS berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi di tingkat daerah, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di daerah yang akses perbankan umum (syariah maupun konvensional) terbatas, BPRS menjadi tulang punggung penyediaan layanan keuangan syariah.¹⁰

Dalam penelitian ini untuk menilai potensi kebangkrutan terdapat 4 metode analisis *Financial Distress* atau kebangkrutan diantaranya Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover. Namun dalam penelitian ini menggunakan tiga metode analisis kebangkrutan Altman, Zmijewski, dan Grover karena ketiganya dinilai mampu memberikan hasil yang cukup akurat dalam mengidentifikasi potensi kebangkrutan perusahaan. Metode Altman mengelompokkan perusahaan dalam kategori sehat, zona abu-abu, atau berisiko bangkrut. Zmijewski menilai tingkat risiko kebangkrutan, sedangkan Grover membedakan perusahaan yang sehat dari yang berpotensi bangkrut. Ketiga metode ini dipilih juga karena rasio-rasio keuangannya dapat diakses melalui laporan keuangan, sehingga memudahkan penerapan dalam penelitian.

¹⁰ OJK.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah. 2019.

Metode analisis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Altman. Metode ini merupakan model prediksi kebangkrutan yang memanfaatkan empat indikator keuangan utama yang diyakini mampu menggambarkan kondisi finansial perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, metode Altman diterapkan untuk menilai potensi kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hasil pengembangan model ini menghasilkan rumus Z-Score yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan.

Metode analisis kedua yang digunakan adalah metode Zmijewski. Metode ini dikembangkan melalui riset selama 20 tahun dan diperkenalkan pada tahun 1983. Zmijewski menggunakan analisis rasio keuangan yang mencakup aspek profitabilitas, leverage, dan likuiditas untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Model ini dinilai efektif dalam mengukur risiko keuangan, termasuk pada lembaga seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹¹

Metode analisis ketiga adalah metode Grover. Model ini dikembangkan oleh Jeffrey S. Grover pada tahun 1968 sebagai hasil dari evaluasi dan penyempurnaan terhadap model Altman Z-Score. Grover menggunakan tiga rasio keuangan utama yang berkaitan erat dengan kondisi *financial distress*,

¹¹ Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. *Journal of Accounting Research*, 22, 59-82.

sehingga dinilai efektif dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan, termasuk lembaga keuangan seperti BPRS.¹²

Berdasarkan ketiga metode tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kebangkrutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada wilayah Indonesia di luar Pulau Sumatera dan Jawa untuk periode 2022–2024. Penelitian ini dilakukan karena studi kebangkrutan umumnya lebih banyak difokuskan pada bank umum atau perusahaan besar, sementara kajian terhadap BPRS masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis yang lebih spesifik bagi pengembangan sektor keuangan syariah mikro di Indonesia.

Alasan lainnya, BPRS memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi daerah. Stabilitas dan kesehatan keuangan BPRS menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama di wilayah Indonesia bagian luar Pulau Sumatera dan Jawa yang memiliki karakteristik ekonomi serupa. Wilayah ini juga cenderung kurang mendapat perhatian dalam riset keuangan dibandingkan kawasan Indonesia bagian barat. Mengingat fluktuasi ekonomi lokal dapat memengaruhi kinerja BPRS, evaluasi terhadap risiko kebangkrutan menjadi penting.¹³ Pemilihan periode 2022–2024 dimaksudkan untuk mencerminkan kondisi terkini BPRS di wilayah tersebut.

¹² Grover, J. S. (2001). *Financial ratio, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy: A service industry extension of Altman Z-score model*. Journal of Southern Finance Association, Annual Meeting

¹³ bankmarobaite.id/11569/mengenal-bank-perkreditan-rakyat-bpr. 2024

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN, ZMIJEWSKI DAN GROVER PADA BPRS DI INDONESIA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia Bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa Yang Terdaftar Di OJK Periode 2022-2024)**

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini ada beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah disinggung dalam latar belakang penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan pertanyaan berikut:

1. Apakah Metode Altman dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?
2. Apakah Metode Zmijewski dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?
3. Apakah Metode Grover dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?
4. Apakah terdapat perbedaan dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Indoneisa bagian Luar pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk:

1. Untuk mengetahui Metode Altman dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024
2. Untuk mengetahui Metode Zmijewski dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024
3. Untuk mengetahui Metode Grover dapat menganalisis kebangkrutan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia bagian Luar Pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024
4. Untuk mengetahui uji beda dari hasil analisis kebangkrutan dengan menggunakan Metode Altman, Zmijewski dan Grover pada BPRS di Indonesia bagian Luar pulau Sumatera dan Jawa yang terdaftar di OJK Periode 2022-2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menggunakan model prediksi kebangkrutan yang tepat dalam menilai kondisi keuangan BPRS yang berpotensi mengalami kebangkrutan.

2. Bagi nasabah BPRS diharapkan dapat memberikan informasi bagi para nasabah dalam melakukan kegiatan BPRS, serta nasabah merupakan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi kebangkrutan dan kesehatan BPRS.
3. Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi tentang metode kebangkrutan yang tepat dalam memprediksi BPRS yang mengalami kebangkrutan serta menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penulisan ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode penelitian, jenis, subjek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasannya

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi

